BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Konseptual

1. Kemiskinan

a. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu problematika yang konteks karena kemiskinan dapat mengakibatkan manusia kehilangan keimanan yang akan menimbulkan maraknya tindak kejahatan, prilaku moral, dan krisis akhlaq.

Kemiskinan itu sendiri telah menjadi isu sosial sekaligus isu politik yang banyak dibicarakan dibeberapa kalangan, baik kaum politis maupun kaum cendikia. Kemiskinan mempunyai banyak pengertian, di antaranya :

- Sar A. Levitan mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang di butuhkan untuk mencapai suatu standart hidup yang layak
- Bradley R.Schiller mendefinisikan kemiskinan ketidak sanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas.
- Emil Salim mendefinisikan kemiskinan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok[11]

Selain definisi kemiskinan yang di kemukan oleh para ahli di atas, John Friedmaan secara rinci mendefinisikan kemiskinan sebagai

[11] L Laesyendecker, *tata, perubahan dan ketimpangan* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996) h. 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketidaksamarataan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial itu meliputi :

1. Modal yang produktif atas aset, misalnya : tanah perumhan, peralatan dan kesehatan.
2. Sumber keungan seperti income dan kredit yang memadai.
3. Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti partai politik, atau koperasi.
4. Jaringa sosial untuk memperoleh perkerjaan, barang-barang, pengertahuan dan keterampilan memadai dan
5. Informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan.[12]

Jadi, kemiskinan adalah suatu kekurangan dan ketidak sanggupan untuk mendapatkan barang-barang pokok yang berupa (papan, sandang, pangan) dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan sosial yang terbatas untuk mencapai standar hidup yang layak, sehingga mereka yang berada dalam garis kemiskinan tidak mendapatkan hak-hak mereka. Dan kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan: kekurangan pendidikan, keadaan, kesehatan yang buruk dan kekurangan tranportasi yang dibutuhkan masyarakat.

Dari beberapa konsep kemiskinan diatas, yang berhubungan dengan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan (P2KP) di

---

[12] Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengetasanya Dalam Pembanguna Desa*, (Yogyakarta: Aditya Media 1966) h. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalimas, Kecamatan Pabean Cantikan, Kabupaten Surabaya adalah pendapat dari Bradley R.Schiller mendefinisikan kemiskinan ketindak sanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Hal ini disebabkan karena masyarakat Kalimas kurang mendapatkan pelayanan dari pemerintah misalnya, tidak mendapatkan fasilitas yang memadai seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Tingkat pendidikan pada umumnya rendah, banyak diantara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan memadai.[13]

Maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan Bappeko dalam melakukan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) adalah program yang dilakukan oleh pemerintah melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan yang terjadi selama ini.

b. Penaggulangan Kemiskinan

Kemiskinan berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan muncul karena sumber daya manusia tidak mungkin dicapai bila penduduk dibelenggung kemiskinan oleh karena itu dalam

[13] L Laesyendecker, *tata, perubahan dan ketimpangan* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996) h. 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengembangan SDM salah satu program yang dilaksanakan adalah mengurangi dan menghapuskan kemiskinan.[14]

Bahwa untuk menggurangi kemiskinan diperluhkan kerjasama, kerjasama antara berbagai disiplin ilmu politi, dan terutama merek terlibat langsung kaum miskin.[15]

c. Faktor Penyebab Dari Kemiskinan

Kemiskinan pada dasarnya bukan hanya permasalahan ekonomi tetapi lebih bersifat multidimensional dengan akar permasalahan terletak pada sistem ekonomi dan politik bangsa yang bersangkutan. Masyarakat menjadi miskin oleh sebab adanya kebijakan ekonomi dan politik kurang menguntungkan mereka, sehingga mereka tidak memiliki akses yang memadaikan ke sumber daya-sumber daya kunci yang di butuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak. Akibatnya mereka terpaksa hidup di bawah standar yang tidak dapat lagi dinilai manusiawi, baik dari aspek ekonomi, aspek pemenuhan kebutuhan fisik, aspek sosial, dan secara politikpun mereka tidak memiliki sarana untuk ikut dalam pengambilan keputusan penting yang menyangkut hidup mereka.

Proses ini berlangsung timbal balik saling terkait dan saling mengunci dan akhirnya secara akumulatif memperlemah masyarakat

---

[14] Tajuddin Noer Effendi, SDM, *Peluang Perkerja dan Kemiskinan* (Yogyakarta : Tiara Wacana 1005), h. 249

[15] Bob Gaundzward dan Harry de Lange, *Dibalik Kemiskinan dan Kemakmuran* (Yogyakarta : Konitisius, 1998), h. 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

miskin. Situasi ini bila tidak segera di tanggulangi akan memperparah kondisi masyarakat miskin yang ditandai dengan lemahnya etos kerja, rendanya daya perlawanan terhadap berbagai persoalan hidup yang dihadapi, kebiasaaan-kebiasaan buruk yang terpaksa mereka lakukan dalam rangka jalan pintas mempertahankan hidup mereka yang bila berlarut akan melahirkan budaya kemiskinan yang sulit diberantas.[16]

Kemiskinan di sebabkan oleh ketimpangan dan kesenjangan sosial. Dalam kaum kapitalis berhasil mengutamakan nilai-nilai ekomomi dari pada nilai yanh lainya, seperti nilai politik[17] Mereka dengan luasa memperkerjakan kaum proletar (kaum buruh) dengan semena-mena. Dari berbagai macam kesenjangan yang ada dalam kehidupan sosial yang membuat para kaum miskin semakin miskin dan orang-orang yang ada di tingkat yang paling atas (orang kaya) semakin makmur.[18]

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Bagong Suyanto pada tahun 1995, ada lima faktor yang disinyalir menjadi penyebab kemiskinan di perdesaan maupun diperkotaan tetap mencolok, termasuk di Propinsi Jawa Timur, yakni:

1) Sempitnya penguasaan dan pemilikan lahan atau akses produksi lain, ditambah lagi kurang tersedia modal yang cukup untuk usaha.

---

[16] Ninik Sudarwati, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Kegagalan Penanggulagan Kemiskinan*. (Malang : Intimedia 2009) h. 33

[17] L Laesyendecker, *Tata, Perubahan dan Ketimpangan* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996) h. 14

[18] Sri Edi Suwarsono. *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan : Dari Cedikiawan Tentang Islam* (Jakarta : UI Press, 1987) h. 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Karena nilai tukar hasil produksi yang semakin jauh tertinggal dengan hasil produksi lain, termasuk kebutuhan hidup sehari-hari.
3) Karena tekanan perangkap kemiskinan dan ketidaktahuan masyarakat, dalam arti mereka relatif terisolir atau tidak memiliki akses yang cukup untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan. Disamping itu masyarakat secara fisik lemah karena kurang gizi, mudah terserang penyakit, tidak berdaya dan rentan.[19]

Said Rusli, menjelaskan mengindentifikasi golongan miskin dapat dikaitkan dengan permasalah berikut:

1) Kekurangmampuan meraih peluang ekonomi: peluang berkerja, upah rendah, malas berkerja, dan sebagainya.
2) Penguasaan asep produksi yang rendah :lahan, air, factor produksi dan jangkauan pelayanannya.
3) Kondisi kurang gizi dan kesulitan memenuhi kebutuhan pangan dan sandang.
4) Mempunyai anak balita yang kurang gizi dan kesehatan yang rendah.
5) Kondisi perumahan tak layak huni atau kumuh.
6) Kekurangmampuan menyekolahkan anak.

---

[19] Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengetasanya Dalam Pembagunan Desa*, (yogyakarta: Aditya Media 1966) h. 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Kekurangmampuan meraih pelayanan kesehatan, air bersih da keserasian lingkungan.[20]

d. Kategori Kemiskinan

Menurut jenisnya kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua katagori yaitu :

1) Kemiskinan relatif yakni perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan suatu daerah. Kemiskinan jenis ini dikatakan relative karena lebih berkaitan dengan distribusi pendapatan antar lapisan social misalnya, membandingkan proporsi pendapatan nasional yang di terima oleh kelompok social tertentu dengan kelompok-kelompok social lainnya. [21]

   Menurut kriteria Bank Dunia : (1) jika 40% jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima kurang dari 12% pendapatan nasional, maka disebut pembagian pendapatan nasional yang sangat timpang, (2) jika 40% jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerimah 12-17% dari pendapatan nasional, maka disebut ketidakmerataan sedang, dan (3) jika 40% jumlah penduduk dengan pendapatan nasional, maka disebut ketidakmerataan rendah.

2) Kemiskinan absolut, yakni suatu keadaan dimana tingkat pendapatan absolut dari satu orang tidak mencukupi untuk

---

[20] Ninik Sudarwati, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Kegagalan Penanggulagan Kemiskinan.* (Malang : Intimedia 2009) h23

[21] Drs. Abu Hurairah, M.Si, *Pengorganisasian Pengembangan Masyarakat, Model dan Strategi Pembangunan Berbasisi Rakyat.* (Bandung : Humaniora-Anggota IKAPI, 2008) h. 168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti : sandang, pangan, papan, pemukiman, dan pendidikan. Menurut criteria Biro Pusat Statistik (BPS) dengan menghitung pengeluaran rumah tangga untuk kosumsi berdasarkan data survei Sosial-Ekonomi Nasional (SUSENAS) diterapkan batas garis kemiskinan absolut adalah setara dengan tingkat pendapatan yang diperluhkan untuk memenuhi kebutuhan kosumsi 2.100 kalori per orang, beberapa kebutuhan non makanan lain, seperti sandang, pangan, papan, jasa dan lain-lain.[22]

Pada tahun 1971, Sajogyo mengusulkan cara mengukur kemiskinan dengan pendekatan kemiskinan absolut. Cara yang dikembangkan adalah memperhitungkan standar kebutuhan pokok berdasarkan atas kebutuhan beras dan gizi. Ada tiga golongan orang miskin, yaitu golongan orang yang paling miskin yang mempunyai pendapatan per kapita, pertahun beras sebanyak 240 kg atau kurang, golongan orang miskin sekali yang memiliki pendapatan per kapita pertahun beras sebanyak 240 hingga 360 kg, dan lapisan miskin yang memiliki pendapatan beras per kapita per tahun lebih dari 360 kg tetapi kurang lebih dari 480 kg. miskipun upaya yang dilakukan oleh sayogyo pada akhirnya menimbulkan

[22] Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengetasanya Dalam Pembanguna Desa*, (yogyakarta: Aditya Media 1966) h. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdebatan, namun dia telah berjasa dalam meletakan standar obyektif pengukuran garis kemiskinan [23]

Menurut kartasasmita bentuk-bentuk kemiskinan terdiri dari tiga kemiskinan yaitu:

1) Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan, hanya dapat imbalan pendapatan yang rendah. Menutut Revisond baswir kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam. Kondisi kemiskinan seperti ini menurut kartasasmita disebut sebagai *"Persisten Poverty"* yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Daerah seperti ini daerah yang kritis sumber daya alamnya atau daerah terisolir.
2) Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabknan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya di mana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk berpartisipasi dalam pembangunan, tidak ingin berusaha untuk memperbaiki dan merubah tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan

[23] Drs. Abu Hurairah, M.Si, *Pengorganisasian Pengembangan Masyarakat, Model dan Strategi Pembangunan Berbasisi Rakyat.* (Bandung : Humaniora-Anggota IKAPI, 2008) h. 168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka rendah menurut ukuran yang dipakai secara umum. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Revisond baswir bahwa ia miskin karena faktor budaya seperi malas, tidak disiplin, boros dan lain-lain

3) Kemiskinan stuktural menurut Revisond baswir kemiskinan yang di sebabkan oaleh fator-faktor buatan manusia, yaitu seperti kebijakan perekonomian yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya sumodinigrat mengatakan bahwa munculnya kemiskinan stuktural disebabkan berupaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu dengan direncanakan bermacam-macam program dan kebijakan. Namun karena pelaksanaan tidak seimbang, pemilikan sumber daya tidak merata, sehingga menimbulkan stuktural masyarakat yang timpang. Menurut kartasismita hal ini disebut *"accidental poverty"* yaitu kemiskinan karena dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunya tingkat kesejahteraan masyarakat.[24]

e. Kemiskinan Dalam Perpektif Islam

Pemetaan ekonomi adalah salah satu masalah besar dalam ekonomi yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Setiap pemerintah

[24] Ninik Sudarwati, *kebijakan Pengentasan Kemiskinan mengurangi kegagalan penanggulagan kemiskinan.* (Malang : Intimedia 2009) h. 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara manapun berusaha untuk mengatasinya, namun tingkat keberhasilan dalam mengatasi masalah itu tergantung mekanisme dari sistem ekonomi yang dianut negara tersebut.

Kemiskinan sebagai gejala sosial adalah muncul sama tuanya dengan usia manusia, amun demikian kemiskinan akan tetap menjadi pembicaraan terus menerus selama masih ada manusia. Al-Qur'an sebagai pentunjuk mikro telah memberikan peringatan kepada umat manusia. Sebagai bunyi surat Al-Ma'un ayat 1-7 menunjukan bahwa kemiskinan itu ada semenjak manusia itu ada. Orang yang mengaku beragama dan sholat tetapi tidak ingin menolong orang yang lemah dan miskin adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Secara implist peringatan tersebut mengandung makna bahwa kemiskinan dan ketidak miskinan akan selalu ada agar umat manusia saling tolong menolong.[25]

Islam menjadikan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi sebagai isu besar perekonomian yang bersifat universal dan abadi. Allah sudah memerintahkan umat islam untuk memperhatikan kesenjangan ekonomi sebagaimana tersurat dalam sural Al-Ma'un. Dalam sisi *supply*, Allah mengajarkan muslim yang miskin untuk optimis dalam berusaha mencari risqi sebagai motifasi meningkatkan produktifitas, dan meningkatkan kesabaran sebagai benteng mental menghadapi kondisi yang kurang memadai, serta beriman kepada Allah SWT.

---

[25] Ishomuddin, *Sosiologi Perpektif Islam* (Malang: UMM pers, 2005) h. 353

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang risqi yang berbeda antar manusia sebagai peredam kecemburuan sosial dan terhadap golongan kaya.

Dalam sisi *demand*, Islam mempunyai mekanisme distribusi pendapatan, seperti zakat, infaq, sedekah dan usaha pemerintah lain seperti kharaj bagi kafir zimmi dan pembagian harta *fa'i*. Mekanisme ini sanggup merendam kecemburuan sosial dan mencukupi kebutuhan pokok golongan kelas bawah seperti pangan, kesehatan dan pendidikan.[26]

Islam berusaha menghilangkan kemiskinan dengan berbagai ketentuan dan aturan. Dengan berbagai cara, ia berupaya mengentaskan umat manusia dari lemah kemelaratan. Menurut pandangan Islam, orang miskin bukanlah anggota strata kaum miskin yang diwarisi dari ayah, neneknya. Menurut keyakinan Islam, kemiskinan masyarakat bukanlah fakta yang baku dan abadi, melainkan situasi sementara. Orang-orang miskin hari ini bisa saja menjadi kaya pada esok hari. Semua pihak dalam masyarakat Islam memiliki kesempatan luas menjadi orang kaya tanpa membedakan status sosial.[27] Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur : 32, yang artinya :

".....Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya...."

---

[26] Mohammad Nur Rohani, Jurnal dan Makalah: *Kemiskinan Dalam Pespektif Sistem Ekonomi Islam*. 09 juli 2001

[27] Yusuf Qardhowi. *Kiat Islam Mengetaskan Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani Press : 1995) h. 180

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam masyarakat Islam, kemiskinan tidak mengurangi harga diri seseorang, dengan kemiskinan itu haknya tidak akan hilang sedikitpun. Islam mengajarkan kepada pengikutnya bahwa harga diri tidak di tentukan oleh harta yang melimpah tetapi oleh ilmu, iman, taqwa sera amal sholeh.[28]

f. Kemiskinan di Perkotaan

Masalah kemiskinan di Indonesia tidak hanya melanda perdesaan, tetapi juga perkotaan. Khususnya di wilayah perkotaan, salah satu ciri umum kondisi masyarakat yang miskin adalah tidak adanya prasarana dan sarana dasar perumahan dan pemukiman yang memadai, serta kualitas lingkungan yang kumuh dan tidak layak huni. Kemiskinan merupakan masalah stuktural dan multi-dimensional yang mencakup soial dan politik.

Seperti yang dikatakan T. Mc Gee, kota tumbuh menjadi metropolis di saat yang sama berhadapan dengan masalah keterbatasan biaya pembangunan dan kemampuan kota untuk menyediakan lapangan perkerjaan bagi kaum migran yang berbondong-bondong memasuki kota besar, kesempatan kerja yang tersedia biasaya lebih banyak di sektor formal dan jasa menuntut pesyarakatan pendidikan tinggi padahal, ciri-ciri migran yang melakukan urbanisasi ke kota

[28] Awan Setya Dewanta, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia* (yogyakarta : Aditya Media, 1995) h. 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar umumnya adalah pendidikan rendah, relatif tua dan sudah berkeluarga.

Kota yang berhak mengklaim sebagai kota besar yang maju sesungguhnya harus berkaca pada dua hal yaitu *pertama*, sejauh mana kota itu mampu menyediakan layanan fasilitas publik dan lapangan perkerjaan yang memadai bagi penduduknya, khususnya penduduk miskin kota, *kedua*, sejauh mana kebijakan kemajuan sebuah kota yang bersejajaran dengan kepentingan kaum miskin dan bahkan benar-benar berpihak pada masyarakat miskin. Sebuah kota yang tumbuh besar secara fisik dan ekonomi, namun menafikan kebutuhan dan nasib masyarakat miskin maka akan cenderung menjadi kota profitopolis, semata mengejar dan melayani kepentingan kekuatan komersial, sebaliknya mengalienasikan kepentingan masyarakat miskin.

Pembangunan kota besar yang hanya menekankan pada aspek pertumbuhan ekonomi secara fisik ternyata dalam banyak hal justru melahirkan orang-orang miskin baru, masyarakat rentan, dan masyarakat pinggiran diperkotaan atau lazim disebut masyarakat marginal. Secara faktual, yang dimaksud masyarakat marginal sebetulnya hampir sama dengan masyarakat miskin akan tetapi lebih dari sekedar fenomena ekonomi dalam arti rendahnya penghasialan atau tidak memilikinya mata pencaharian yang cukup mapan untuk tempat bergantung hidup ensensi dari masyarakat marginal adalah menayangkut kemungkinan atau probalitas orang atau keluarga miskin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu untuk melangsungkan dan mengembangkan usaha serta taraf hidupnya. Sebuah keluarga yang mengalami proses marginalisasi, mereka umumnya tidaklah berdaya, dan cenderung sulit untuk terserap dalam sektor-sektor yang memungkinkan masyarakat dapat mengembangkan usahanya. Jagankan untuk memgembangkan diri menuju taraf kesejahteraan, untuk bertahan menegakan hidup fisiknya pada taraf yang subsistem saja bagi keluarga miskin hampir-hampir merupakan hal yang mustahil bila tidak ditopang oleh jaringa dan pranata sosial di lingkungan sekitarnya.

Di kota besar golongan masyarakat mengalami proses marginalisasi umumnya adalah kaum migran, seperti pedagang kaki lima, penghuni pemukiman kumuh, pedagang asogan yang umumnya tidak terpelajar dan tidak terlatih. Golongan masyarakat marginal itu meliputi juga para pengusaha tanpa modal dan tanpa fasilitas dari pemerintah yang sekarang dapat dinamakan dengan golongan ekonomi yang sangat lemah.[29]

---

[29] Moh.ali aziz, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat , paradigma Aksi Metodologi*,. (yogyakarta: Pustaka Pesantren 2005) h. 165-166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Upaya Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan secara konseptual dapat dilakukan empat jalur strategi yaitu

1) Perluasan kesempatan

Strategi perluasan ditunjukan menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan social yang memungkinkan masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

2) Pemberdayaan masyarakat

Strategi pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk memperkuat kelembagaan social, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat, perluas partisipasi masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan kebijakan public yang menjamin kehormatan, pelindungan, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

3) Peningkatan kemampuan/kapasitas

Strategi peningkatan kapasitas dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan usaha masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Pelindungan sosial

Stategi pelindungan social dilakukan untuk memberikan pelindungan rasa aman bagi kelompok rentan (kepala rumah tangga fakir miskin, orang jompo, anak telantar, kamampuan berbeda/penyandang cacat) dan masyarakat miskin baru baik laki-laki maupun perempuan disebabkan antara lain bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial.

Upaya peananggulangan secara praktis dapat berlangsung dalam dua variasi yaitu : pertama, adanya satu program yang mengadopsi lebih dari satu strategi tersebut secara paralel dan berkaitan. Misalnya program pengembangan kecamatan, program penanggulangan kemiskinan diperkotaan, program pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil,dan program peningkatan pendapatan petani dan nelayan kecil untuk mejalankan instrumen peberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas, perluasan kesempatan berusaha, dan pelindungan social. Kedua, adanya satu program yang hanya mengadopsi salah satu dari strategi tersebut. Misalnya program bantuan tunai kepada rumah tangga miskin sebagai instrumen pelindungan social. Program kompensasi pengurangan subsidi bahan baker minyak kepada rumah tangga masyarakat miskin melalui komponen pendidikan dan kesehatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(program asuransi kesehatan untuk keluarga miskin, ASKESKIN) untuk menjalankan instrument strategi peningkatan kapasitas.[30]

Dari pembahasan tersebut maka, di perlukan sebuah kebijakan pemerintah daerah yang terpadu dalam menanggulangi kemiskinan yaitu :

1) Kebijakan dan Program Peluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Berusaha

   Program kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dirancang untuk membantu rumah tangga miskin untuk mempertahankan daya beli mereka. Program ini dilaksanakan di wilayah yang menderita sangat hebat krisis, seperti wilayah perkotaan dan wilayah-wilayah yang kering. Program utama yang dikembangkan didalam program tersebut, yang pertama adalah sector padat karya, utamanya untuk merancang kembali proyek-proyek yang sedang berjalan untuk menjadi proyek-proyek padat karya. Sebagai contoh, proyek infrastruktur pada departemen perkerjaan umum dirancang kembali untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja. Kuncinya adalah untuk merancang kembali proyek yang sedang berjalan. Yang kedua, padat karya khusus, utamanya adalah untuk menciptakan proyek khusus untuk menyerap oaring yang telah diberhentikan dari perkerjaan sekarang. Program padat karya khusus terdiri

[30] Randy R. Wrihantnolo, *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantardan Panduan Untuk Pemberdayaan masyarakat.*(Jakarta :PT Elex Media Komputindo, 2007) h. 34-35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari proyek-proyek yang menghadapi masalah lapangan perkerjaan yang disebabkan krisis ekonomi, program padat karya untuk menghadapi pengangguran dari pekerja trampil. Pendekatan dari dua program diatas adalah dari atas kebawah dan bersifat depatemental.[31]

Maka pemerintah melakukan berbagai kebijakan yang diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan produktifitas usaha, khususnya bagi masyarakat miskin, dengan langkah-langkah:

a) Pengembangan mekanisme penyaluran kredit bagi koperasi, usaha kecil dan mikro dengan bunga terjangkau
b) Penataan, pengembangan dan pelindungan pedang kecil, termasuk pedng informal sehingga mendukung pembangunan secara keseluruan.
c) Penyedian modal usaha yang berasal dari pemerintah, swasta dan masyarakat serta melindungi hak masyarakat miskin dalam usaha.

2) Program Pemberdayaan Masyakat

Sektor swasta dan masyarakat umum mendorong dan meningkatkan kemampuan (memberdayakan) masyarakat miskin agar memperoleh hak-hak ekonomi, sosila dan politiknya, mengontrol keputusan dan menyangkut

[31] Prijono Tjiptoherijanto, *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingannya., menyalurkan aspirasi dan mampu secara mandiri mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Maka, langka dan kebijakan diarahkan pada :

a) Meningkatkan kapasitas dan pembangunan kelembagaan masyarakat, khususnya masyarakat miskin untuk mengembangkan demokrasi, dan meningkatkan partisipasi dalam proses pembangunan.
b) Meningkatkan peran serta masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan yang berdampak langsung pada penanggulangan kemiskinan.
c) Peningkatan dan penyebarluaskan informasi dan pengertahuan berbagai skema pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berpihak pada masyarakat miskin.

3) Kebijakan dan Program peningkatan kapasitas

Pemerintah, sektor swasta dan masyrakat berupaya meningkatkan kapasitas atau kemampuan masyarakat miskin agar mampu berkerja dan berusah secara lebih produktif dan mampu memperjuangkan kemampuannya. Untuk itu, kebijakan yang perlu diambil meliputi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat misikin melalui penyediaan kebutuhan pokok dan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan air bersih

b) Peningkatan partisipasi pendidikan masyarakat miskin pada jenjang wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun melalui jalur formal maupun non formal.

c) Mengembangkan / meningkatkan kapasitas dan kewirausahaan bagi masyarakat miskin melalui pendidikan dan pelatihan

d) Peningkatkan kapasitas aparatur dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang berpihak pada masyarakat miskin.[32]

4) Kebijakan dan Program Pendidikan pelindungan sosial

Program pelindungan sosial adalah untuk memelihara jasa pelayanan pendidikan kepada keluarga miskin program ini mencakup tiga aktivitas yaitu : beasiswa dan bantuan keuangan operasional, rehabilitas gedung-gedung sekolah dasar, dan pembangunan gedung-gedung sekolah baru. Di bawah program pendidikan pelindungan sosial, anak-anak dari keluarga miskin dibebaskan dari uang sekolah dan kewajiban keuangan lainnya yang terkait dengan tujuan proses belajar.[33]

---

[32] Ninik Sudarwati, *kebijakan Pengentasan Kemiskinan mengurangi kegagalan penanggulagan kemiskinan.* (Malang : Intimedia 2009), h. 43-45

[33] Prijono Tjiptoherijanto, *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah melalui kebijakan public mengajak masyarakat memberikan pelindungan dan rasa aman bagi masyarakat miskin, untuk itu Kebijakan diarahkan pada :

a) Peningkatan pembinaan, pelayanan dan pelindungan sosial dan hukum bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, dan anak cacat
b) Pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan bagi masyarakat paling miskin dan orang jompo
c) Pengembangan sisitem pelindungan social yang adil dan berkelanjutan melalui skema-skema asuransi pendidikan, kesehatan dan pengangguran.
d) Pengembangan kapasitas anak jalanan, anak cacat melalui kegiatan pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja. [34]

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan tersebut, telah dilakukan berbagai program yaitu program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP), program daerah dalam mengatasi dampak krisi ekonomi (PDMDKE), dan program lainnya.

Miskipun masyarakat miskin telah mendapatkan bantuan program penanggulangan kemiskinan, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapka. Masyarakat miskin yang tersentuh program penanggulangan kemiskinan, tetap saja mereka tidak

[34] Ninik Sudarwati, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Kegagalan Penanggulagan Kemiskinan* (Malang: Intimedia, 2009), h. 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meranjak dari kondisi kemiskinannya. kesejahteraan yang mereka impikan, masih jauh dari kenyataan. Oleh karena itu, pasti ada yang salah dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tersebut. Kesalahan dalam penerapan strategi penanggulangan kemiskinan adalah berkaitan dengan kekeliruan dalam cara pandang (paradigma) penanggulangan kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan yang selama ini terjadi memperlihatkan beberapa kekeliruan paradigmatik, antara lain:

a) Masih berorientasi pada aspek ekonomi daripada aspek multidimensional. Penanggulangan kemiskinan dengan fokus perhatian pada aspek ekonomi terbukti mengalami kegagalan, karena pengetasan kemiskinan direkdusi dalam soal-soal ekonomi tidak akan mewakili perdoalan kemiskinan yang sebenarnya, fenomena kemiskinan beraneka ragam yang juga berkaitan dengan dimensi budaya dan dimensi stuktural atau politik.[35]

[35] Abu Hurairah, *Pengorganisasian Pengembangan Masyarakat, Model dan Strategi Pembangunan Berbasisi Rakyat.* (Bandung : Humaniora-Anggota IKAPI, 2008) h. 168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Titin Hamidah, Pengentasan Kemiskinan oleh Penyuluh Pertanian di Desa Mentaras, Kecamatan Dukun, Kabupaten gresik (Studi Dakwah dengan Pendekatan Perkerjaan Sosial). Skripsi tahun 1999. focus kajian penelitian ini membahas tentang upaya penyuluhan pertanian Bapak Agus Pamudji dalam mengentaskan kemiskinan pada sepuluh keluarga yang tergolong dalam kelompok petani di Desa Mantras, Kecamatan Dukun, Kabupaten gresik.
2. Zainal arifin, Pembangunan dan Problem Sosoial di Perkotaan "analisis Problem Kemiskinan Masyarakat Wonokromo Sebagai Dampak Pembangunan Kota Surabaya" Skripsi tahun 2006. fokus kajian penelitian ini pada proses pembangunan yang berlangsung dalam masyarakat melalui perangkat hukum dengan menafikkan eksitensi masyarakat serta problem yang ditimbulkannya sebagai akibat kurangnya partisipasi masayakat.
3. Ari Mukhrizal, Pengetasan Kemiskinan Pada Masyarakay Kota " Studi tentang pelaksanaan Program Badan Keswadayaan Masyarakat Kureksari Puspasari Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kureksari Kec. Waru. Kabupaten Sidoarjo" Skripsi tahun 2006. fokus penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan program-program LSM di Kureksari Dalam Pengetasan Kemiskinan.
4. Mahira Yunani Abika, Upaya LSM SpeKtra Dalam mengentas Kemiskinan (Studi Tentang Pelaksanaan Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin) Dalam Pemberdayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat di Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang). Skripsi tahun 2007, fokus penelitian ini adalah pelaksanaan program gerakan terpadu pengentasan kemiskinan (gerdu taskin) di Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang

Dari empat penelitian tersebut, yang beriontasi membahas tentang :

- Kemiskinan sebagai dampak dari pembangunan ekonomi
- Bagaimana cara mengatasi kemiskinan.
- Bagaimana upaya penyuluhan pertanian Bapak Agus Pamudji dalam mengentaskan kemiskinan pada sepuluh keluarga yang tergolong dalam kelompok petani
- Bagaimana program pelaksanaan program pengentasan kemiskinan (gerdu taskin)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id